

EVALUASI KEBIJAKAN APLIKASI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR DALAM PENGELOLAAN KINERJA GURU DI SMPN 3 KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI

Syarif Hidayat¹, Bambang Mardisentosa², Dafyar Eliadi H³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam pengelolaan kinerja guru di SMPN 3 Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. PMM merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sekaligus sebagai instrumen pembinaan dan penilaian kinerja guru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMM di SMPN 3 Karang Bahagia telah cukup efektif dalam memfasilitasi guru untuk mengakses materi, melakukan refleksi, serta mengembangkan kompetensi secara mandiri. Dari aspek efisiensi, penggunaan PMM membantu menghemat waktu dalam pelaporan kinerja, meskipun masih terdapat kendala teknis terkait jaringan internet. Pada dimensi kecukupan, PMM dianggap sudah mendukung sebagian besar kebutuhan guru, namun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan beban administrasi. Dari segi keadilan, akses platform relatif merata bagi seluruh guru, tetapi perbedaan kemampuan literasi digital masih menjadi tantangan. Aspek responsivitas menunjukkan bahwa guru merasa terbantu dengan fitur yang tersedia, meskipun beberapa fitur belum optimal dimanfaatkan. Sementara dari aspek ketepatan, kebijakan ini dinilai relevan dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih perlu peningkatan dukungan sarana dan pendampingan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar di SMPN 3 Karang Bahagia dapat dikatakan positif dan bermanfaat, meskipun masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek teknis dan pendampingan agar lebih optimal dalam mendukung kinerja guru.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Platform Merdeka Mengajar, Kinerja Guru.

Abstract

This study aims to evaluate the policy of using the Merdeka Mengajar (PMM) Platform for managing teacher performance at SMPN 3 Karang Bahagia, Bekasi Regency. PMM is a policy of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology designed to support the implementation of the Merdeka Curriculum and serve as an instrument for teacher development and performance assessment. The research method used was a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation model, which encompasses six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The results indicate that

the implementation of PMM at SMPN 3 Karang Bahagia has been quite effective in facilitating teachers' access to materials, reflection, and independent competency development. From an efficiency perspective, the use of PMM helps save time in performance reporting, although technical challenges related to the internet network remain. Regarding adequacy, PMM is considered to support most teachers' needs, but has not fully resolved the administrative burden. In terms of fairness, platform access is relatively equitable for all teachers, but differences in digital literacy skills remain a challenge. The responsiveness aspect indicates that teachers feel the available features are helpful, although some features are not yet optimally utilized. Meanwhile, in terms of accuracy, this policy is deemed relevant to the need to improve educational quality, but still requires improved infrastructure and ongoing mentoring. Overall, the policy for using the Merdeka Mengajar Platform at SMPN 3 Karang Bahagia can be considered positive and beneficial, although it still requires improvements, particularly in technical aspects and mentoring, to more optimally support teacher performance.

Keywords: Policy evaluation, Merdeka Mengajar Platform, teacher performance.

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu Pengelolaan sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Usaha terbaru yang dilakukan pemerintah adalah adanya peluncuran kebijakan penggunaan aplikasi platform merdeka mengajar yang secara resmi terjadi pada 11 Februari 2022, dalam acara Merdeka Belajar Episode ke-15 yang juga memperkenalkan Kurikulum Merdeka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 0559/B.B1/GT.02.00/2024 (diterbitkan 2 Februari 2024) dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, mengenai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Dokumen ini menyatakan bahwa penggunaan fitur pengelolaan kinerja dalam PMM: (a) wajib bagi ASN (PNS & PPPK), (b) tidak wajib bagi non-ASN, dan (c) sudah terintegrasi dengan e-Kinerja BKN.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2004) dengan judul Pengaruh Pendidikan, Kemampuan Berkomunikasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan (X1), kemampuan berkomunikasi (X2) dan motivasi kerja (X3) secara bersama-sama dengan kinerja.

Belum optimalnya mutu guru menurut (Sudarminta, 2000:46) antara lain tampak dari gejala-gejala berikut : (1) lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan; (2) ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan lapangan yang diajarkan; (3) kurang efektifnya cara pengajaran; (4) kurangnya wibawa guru di hadapan murid; (4) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul menjadi

guru; (6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap dalam cukup banyak guru sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik; kebanyakan guru dalam hubungan dengan murid masih hanya berfungsi sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik.

Pengelolaan kinerja (performance management) adalah suatu proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim. Secara umum pengelolaan kinerja adalah suatu pendekatan atau proses yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengukur, memantau, menilai, dan mengembangkan kinerja pegawai dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan pengembangan individu, peningkatan kualitas kerja, serta penilaian dan umpan balik terkait kinerja pegawai. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dan memastikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Armstrong (1998) menyatakan bahwa : pengelolaan kinerja adalah proses untuk membangun pemahaman bersama tentang apa yang harus dicapai dan cara mengelola serta mengembangkan orang agar tujuan tersebut dapat tercapai dalam jangka pendek dan panjang.

Sedangkan menurut Philpott dan Sheppard dalam Armstrong (1998) menambahkan : pengelolaan kinerja bertujuan meningkatkan fokus strategis dan efektivitas organisasi melalui perbaikan berkelanjutan pada kinerja individu dan tim.

Sementara itu Bacal (1999) memaknai Pengelolaan kinerja sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara karyawan dan atasan langsung, yang mencakup membangun harapan yang jelas dan pemahaman terkait pekerjaan yang harus dilakukan.

Menurut Sheila J. Costello, yang dikutip oleh Lijan Poltak dalam buku kinerja pegawai, tujuan mengalir dari atas kebawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Diawali dengan membangun visi, dan misi organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan tingkat atas. Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan kepada tujuan jangka panjang organisasi, selanjutnya tujuan jangka panjang tersebut ditindak lanjuti dengan tujuan tahunan. Tujuan tahunan ditindak lanjuti oleh tujuan divisi, bagian, seksi, dan pada akhirnya oleh seluruh pegawai secara berjenjang mulai dari pimpinan atas hingga pegawai. Ukuran atau tanda yang bisa dipakai untuk menilai apakah suatu hal berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks penelitian, indikator digunakan sebagai tolok ukur yang terukur dan dapat diamati. Ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) berhasil, bermanfaat, adil, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan dalam mendukung proses penilaian, pembinaan, dan peningkatan kinerja guru,

Dalam melaksanakan evaluasi ini, peneliti melaksanakan teori indikator evaluasi yang bisa dipakai mengacu pada teori evaluasi William N. Dunn. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam analisis kebijakan publik. Dalam bukunya Public Policy Analysis (1994, edisi-edisi berikutnya juga banyak dipakai), ia menjelaskan teori evaluasi kebijakan yang bisa dipakai untuk menilai apakah suatu kebijakan efektif atau tidak. Menurut Dunn, evaluasi adalah proses memberikan penilaian terhadap kinerja suatu kebijakan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di SMPN 3 Karang Bahagia, peneliti melihat bahwa guru, kepala sekolah dan pengawas serta berbagai pihak terkait mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan pengelolaan kinerja guru. Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan mendayagunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Hal ini sesuai dengan agenda transformasi dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu transformasi dan inovasi yang diperkenalkan oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim adalah penggunaan Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran serta peningkatan kinerja di lingkungan sekolah. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 berfungsi sebagai Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah melalui PMM, yang menjadi landasan hukum teknis untuk penggunaan fitur tersebut. Surat Edaran Bersama Kepala BKN (Nomor 17 Tahun 2023) dan Mendikbudristek (Nomor 9 Tahun 2023) juga mendukung implementasi sistem informasi pengelolaan kinerja melalui PMM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi pengelolaan kinerja guru dengan menggunakan Aplikasi PMM serta faktor penghambat Implementasi pengelolaan kinerja guru melalui Aplikasi PMM di SMPN 3 Karang Bahagia.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan aplikasi PMM dapat mengelola kinerja guru dalam kualitas pembelajaran ?
2. Bagaimana evaluasi kebijakan aplikasi PMM untuk pengelolaan kinerja guru dalam membuat perencanaan pembelajaran ?
3. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung kabijakan aplikasi platform merdeka mengajar ?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya berupa deskripsi dari fakta-fakta atau kondisi yang telah dialami. Lexi J. Moleong (2006:6) berpendapat bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena tentang pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian. Jenis penelitian studi kasus yang digunakan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai aplikasi PMM yang digunakan dalam pengelolaan kinerja guru oleh kepala sekolah. Dengan jumlah informan sebanyak 8 orang informan. Dan Lokasi penelitian bertempat di SMP Negeri 3 Karang Bahagia. Dimana penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan yaitu mulai bulan November 2024 sampai bulan Juli tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Kebijakan aplikasi PMM dapat mengelola kinerja guru dalam kualitas pembelajaran. H. Juanda, S.Pd.MM, selaku Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang bertugas menjadi pengawas bina SMPN 3 Karang Bahagia, dalam wawancaranya menegaskan bahwa kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan kinerja guru, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran.. Beliau mengatakan : “Dengan adanya PMM, saya melihat guru-guru lebih terbantu dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaporkan kinerja, sekaligus mengakses materi pengembangan diri. Hal ini memudahkan kami sebagai pengawas untuk memantau kinerja guru secara lebih terukur dan terdokumentasi. Tidak hanya administrasi, tetapi juga praktik mengajar mereka di kelas menjadi lebih terarah.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari M. Ali Nurdin, S.Pd., selaku Ketua MGMP Informatika Kabupaten Bekasi, yang menilai bahwa kebijakan PMM merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan kinerja guru. Beliau juga menambahkan guru dapat lebih mudah mengakses perangkat ajar, modul pelatihan, hingga fitur refleksi yang membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Ia menyampaikan : “PMM ini sebenarnya bukan sekadar aplikasi, tapi sebuah ekosistem digital yang memudahkan guru dalam belajar dan melaporkan kinerjanya. Dengan begitu, proses pembelajaran bisa lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Karang Bahagia menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja guru sekaligus menjaga kualitas pembelajaran. Kepala Sekolah menegaskan bahwa PMM memberikan manfaat besar bagi manajemen sekolah, karena aktivitas guru dalam pelatihan mandiri maupun pemanfaatan perangkat ajar dapat dimonitor dengan jelas dan transparan. Hal ini membantu pihak sekolah dalam melakukan supervisi kinerja guru secara lebih terukur. Ia mengatakan : “Kebijakan PMM sangat membantu sekolah dalam memonitor kinerja guru, karena aktivitas guru dalam pelatihan maupun penggunaan perangkat ajar bisa terlihat dengan jelas.”

Secara keseluruhan, kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SMPN 3 Karang Bahagia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola kinerja guru agar lebih terarah pada peningkatan kualitas pembelajaran. PMM memberikan ruang bagi guru untuk mengakses perangkat ajar, mengikuti pelatihan mandiri, serta melakukan asesmen yang relevan dengan capaian pembelajaran. Namun demikian, implementasinya di lapangan menunjukkan hasil yang beragam. Bagi sebagian guru dan kepala sekolah, PMM dinilai efektif, responsif, dan tepat sasaran dalam membantu perencanaan maupun evaluasi pembelajaran. Sementara itu, ada pula guru yang menilai bahwa PMM masih kurang efisien, belum adil dalam mendukung semua peran guru, dan terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata siswa di kelas. Dengan demikian, meskipun PMM berpotensi besar sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran, diperlukan upaya

pengembangan lebih lanjut agar kebijakan ini benar-benar adaptif, merata, dan mampu menjawab tantangan pendidikan di berbagai kondisi sekolah.

b. Evaluasi kebijakan aplikasi PMM untuk pengelolaan kinerja guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut analisis datanya yang diambil dari para informan yang selaku stakeholder yang merasakan langsung kebijakan aplikasi PMM ini. Dalam aspek efektivitas, para informan memberikan pandangan yang beragam terkait sejauh mana aplikasi PMM benar-benar mampu mencapai tujuan peningkatan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Efektivitas PMM dalam mengelola kinerja guru dapat dikatakan belum optimal. Aplikasi ini memang memiliki potensi besar dalam menyediakan referensi pembelajaran dan mengarahkan guru untuk meningkatkan kompetensinya, namun keterbatasan dalam implementasi, kesenjangan kompetensi digital guru, serta tuntutan administrasi membuat efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. PMM baru berfungsi efektif sebagai alat pendukung, tetapi belum menjadi instrumen utama yang mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Efisiensi aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan, karena menyangkut sejauh mana aplikasi ini mampu memberikan manfaat optimal dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, baik berupa waktu, tenaga, maupun fasilitas yang dimiliki guru. Dalam konteks implementasi di sekolah, efisiensi PMM dapat dilihat dari kemudahan akses terhadap perangkat ajar, kepraktisan penggunaan fitur, serta kesesuaian antara usaha yang dikeluarkan guru dengan hasil yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam pengalaman guru: sebagian merasa terbantu karena PMM mempercepat penyusunan perangkat ajar, sementara sebagian lainnya menilai bahwa aplikasi ini justru menambah beban karena membutuhkan waktu tambahan untuk penyesuaian materi dan keterampilan teknologi. Oleh karena itu, kajian efisiensi PMM menjadi krusial untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini benar-benar mampu mendukung peningkatan kinerja guru tanpa menimbulkan beban berlebih. Meskipun aplikasi ini diakui memberikan kemudahan dalam penyediaan modul ajar, perangkat pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru, pada praktiknya administrasi manual masih tetap berjalan dan bahkan menimbulkan beban ganda. Secara kebijakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah dirancang untuk memberikan akses yang sama bagi semua guru tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah melalui akun belajar.id telah memastikan setiap guru memperoleh hak yang setara dalam mengakses aplikasi ini. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pada tingkat pemanfaatan dan persepsi di kalangan guru, yang dipengaruhi oleh faktor usia, literasi digital, relevansi kebutuhan, serta kondisi teknis seperti perangkat dan jaringan. Dan ketepatannya masih perlu diperkuat agar benar-benar menjadi solusi optimal bagi peningkatan kinerja guru di SMPN 3 Karang Bahagia.

c. Faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan aplikasi platform merdeka mengajar, tidak semua guru merasa terbantu dengan PMM, karena sebagian masih

menganggap platform ini menambah beban baru, terutama dalam hal teknis penggunaan. Keterbatasan fasilitas seperti laptop, gawai, dan akses internet yang kurang stabil menjadi masalah utama, terutama saat guru dituntut mengakses PMM secara rutin. Selain itu, adanya perbedaan tingkat kemampuan digital antar guru membuat implementasi PMM berjalan tidak merata. Oleh karena itu, meskipun PMM bisa menjadi sarana positif untuk mendukung pengelolaan kinerja guru, meskipun fitur-fiturnya yang mampu membantu guru dalam menyiapkan perangkat ajar dan mendapatkan referensi pembelajaran yang bervariasi. Keberadaan forum berbagi praktik baik juga dinilai sebagai peluang bagi guru untuk belajar dari pengalaman rekan sejawat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah serta adanya tuntutan implementasi Kurikulum Merdeka membuat PMM menjadi salah satu instrumen penting yang mendorong guru untuk lebih adaptif dan kreatif dalam mengajar.

Akan tetapi kebijakan penggunaan PMM memiliki potensi besar sebagai instrumen peningkatan kinerja guru, khususnya melalui penyediaan perangkat ajar, pelatihan mandiri, serta fitur asesmen yang mendukung pembelajaran. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses internet, hingga kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, relevansi konten dengan kebutuhan kontekstual siswa di masing-masing jenjang juga menjadi perhatian. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan PMM tidak hanya bergantung pada ketersediaan fitur, tetapi juga pada pendampingan, penyempurnaan konten, serta dukungan teknis dan kebijakan sekolah agar platform ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan guru sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata.

2. Pembahasan

a. Kebijakan aplikasi PMM dapat mengelola kinerja guru dalam kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, kebijakan aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) dinilai telah memberikan kontribusi dalam mendukung pengelolaan kinerja guru, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan para informan. Sebagian besar guru menyatakan bahwa PMM memberikan kemudahan dalam mengakses perangkat ajar, asesmen, serta contoh praktik baik yang dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah, pengawas, serta ketua MGMP Informatika menegaskan bahwa PMM mampu memfasilitasi guru dalam mengembangkan kompetensi profesional, khususnya dalam hal inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Namun, guru wali kelas pada umumnya menyoroti bahwa pemanfaatan PMM seringkali menambah beban administratif sehingga efektivitasnya dalam mendukung pembelajaran belum sepenuhnya terasa. Guru BK juga menilai bahwa fitur yang tersedia masih lebih berfokus pada aspek akademis, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi layanan non-akademik dan konseling siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun PMM memiliki potensi besar sebagai instrumen peningkatan kinerja guru, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2017) yang menyatakan bahwa kinerja guru tidak hanya diukur dari

kemampuan menguasai materi, tetapi juga dari kualitas pengelolaan pembelajaran dan sejauh mana guru mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan. PMM sebagai kebijakan digital dirancang untuk menjawab kebutuhan guru dalam menghadapi era pendidikan berbasis teknologi. Dengan adanya perangkat ajar digital, pelatihan mandiri, serta asesmen diagnostik, guru diarahkan untuk lebih profesional dan reflektif dalam melaksanakan pembelajaran.

b. Evaluasi kebijakan aplikasi PMM untuk pengelolaan kinerja guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Menurut William N. Dunn (2003) dilakukan melalui enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di SMPN 3 Karang Bahagia, kebijakan penggunaan aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah dievaluasi dengan mengacu pada keenam aspek tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai keberhasilan maupun kelemahan implementasinya. Secara umum, PMM dinilai cukup efektif dalam mendukung peningkatan kinerja guru. Guru dapat memanfaatkan perangkat ajar, asesmen, serta pelatihan mandiri untuk memperkaya strategi pembelajaran. Kepala sekolah dan pengawas menyatakan bahwa dengan PMM, guru memiliki referensi tambahan yang bermanfaat. Namun, efektivitas tidak merata di semua guru. Wali kelas menilai PMM belum sepenuhnya efektif karena sering menambah beban administrasi. Guru BK pun menilai fitur yang tersedia lebih banyak berorientasi akademis, sehingga tidak sepenuhnya mendukung layanan non-akademis. Kebijakan PMM sudah relevan sebagai instrumen peningkatan kinerja guru, namun untuk mencapai hasil maksimal perlu adanya penyesuaian implementasi, penguatan dukungan teknis, serta pengembangan konten yang lebih kontekstual. Dari aspek efisiensi, aplikasi ini belum sepenuhnya praktis karena memerlukan tambahan waktu, keterampilan digital, serta dukungan infrastruktur. Dari aspek kecukupan, PMM sebagian telah menjawab kebutuhan guru, meskipun belum menyeluruh bagi guru dengan keterbatasan teknologi. Dari aspek kesetaraan, akses terhadap PMM terbuka bagi semua guru, tetapi kualitas jaringan dan perangkat menimbulkan perbedaan pemanfaatan. Dari aspek responsivitas, PMM telah mengakomodasi aspirasi sebagian guru, tetapi masih perlu pengembangan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dari aspek ketepatan, kebijakan ini relevan dengan semangat Merdeka Belajar, tetapi penerapannya masih perlu penyesuaian agar sesuai konteks masing-masing sekolah.

c. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung kebijakan aplikasi platform merdeka mengajar.

Beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SMPN 3 Karang Bahagia, antara lain: a). Kebijakan Nasional yang Selaras artinya PMM merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah, sehingga memiliki legitimasi kuat dan dukungan regulatif. Kepala sekolah menilai hal ini mempermudah sekolah dalam mengintegrasikan PMM ke dalam program peningkatan kompetensi guru; b). Ketersediaan Konten dan Fitur Pembelajaran artinya Guru menilai perangkat ajar, asesmen, dan pelatihan mandiri yang tersedia di PMM menjadi sumber daya tambahan yang bermanfaat. Hal ini mendorong guru untuk memperluas wawasan dan strategi pembelajaran; c). Dukungan Kepala Sekolah dan

Pengawas artinya Kepala sekolah dan pengawas memberikan arahan serta pendampingan kepada guru untuk memanfaatkan PMM. Faktor ini memperkuat motivasi guru untuk beradaptasi dengan aplikasi; d). Relevansi dengan Era Digital artinya PMM dianggap tepat dengan tuntutan zaman, di mana digitalisasi pendidikan menjadi keniscayaan. Guru-guru muda, khususnya, lebih mudah menerima dan mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan implementasi PMM, antara lain; a). Keterbatasan Infrastruktur seperti Jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat menjadi kendala utama. Guru mengeluhkan bahwa kondisi ini sering menghambat akses terhadap konten PMM; b). Literasi Digital Guru yang Bervariasi artinya Tidak semua guru memiliki kemampuan teknologi yang sama. Bagi guru yang belum terbiasa, penggunaan PMM menambah beban dan membutuhkan pendampingan lebih intensif; c). Beban Administrasi Tambahan artinya Wali kelas menilai bahwa penggunaan PMM sering menambah beban administrasi, sehingga efektivitas waktu berkurang. Guru merasa aplikasi belum sepenuhnya menyederhanakan pekerjaan mereka; d). Konten yang Belum Sepenuhnya Kontekstual, Guru BK menilai PMM masih dominan pada aspek akademik, sehingga kebutuhan non-akademik seperti bimbingan konseling kurang terakomodasi; e). Kurangnya Pendampingan Teknis Berkelanjutan artinya Meskipun kepala sekolah dan pengawas memberi arahan, pendampingan teknis masih terbatas. Hal ini membuat sebagian guru kesulitan memanfaatkan fitur PMM secara optimal.

D. Kesimpulan

1. Pengelolaan Kinerja Guru

Kebijakan penggunaan PMM terbukti dapat meningkatkan kinerja guru, terutama melalui fitur perangkat ajar, asesmen, pelatihan mandiri, serta berbagi praktik baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital, beban administratif tambahan, serta keterbatasan sarana prasarana seperti internet dan perangkat pendukung.

2. Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Dari aspek efektivitas, PMM cukup membantu guru memperoleh referensi pembelajaran dan peningkatan kompetensi. Dari aspek efisiensi, aplikasi ini belum sepenuhnya praktis karena memerlukan tambahan waktu, keterampilan digital, serta dukungan infrastruktur. Dari aspek kecukupan, PMM sebagian telah menjawab kebutuhan guru, meskipun belum menyeluruh bagi guru dengan keterbatasan teknologi. Dari aspek kesetaraan, akses terhadap PMM terbuka bagi semua guru, tetapi kualitas jaringan dan perangkat menimbulkan perbedaan pemanfaatan. Dari aspek responsivitas, PMM telah mengakomodasi aspirasi sebagian guru, tetapi masih perlu pengembangan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dari aspek ketepatan, kebijakan ini relevan dengan semangat Merdeka Belajar, tetapi penerapannya masih perlu penyesuaian agar sesuai konteks masing-masing sekolah.

3. Faktor pendukung meliputi tersedianya fitur perangkat ajar, asesmen, pelatihan mandiri, fleksibilitas akses digital, serta kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi pembelajaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan jaringan internet, ketersediaan perangkat, beban 266administrative, keterbatasan waktu guru, serta rendahnya literasi digital sebagian guru.

Referensi

Buku

- Amelia, D. E. (2024). Pengaruh Platform Merdeka Mengajar (PMM) terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 5 Pengadegan Purbalingga (*Skripsi*). UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Armstrong, M. (2014). *Armstrong's Handbook of Performance Management (5th ed.)*. London: Kogan Page.
- Bacal, R. (2004). *Performance Management*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Burnes, B. (2017). *Managing Change (7th ed.)*. Harlow: Pearson.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management (1st ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, K. (2023). Pengaruh Penggunaan Platform Merdeka Mengajar terhadap Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Gugus Gatot Subroto (*Skripsi*). Universitas Darul Ulum.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. New York, NY: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy (15th ed.)*. Boston, MA: Pearson.
- Faisal, A. (1984). *Strategi Menurut Para Ahli*. Bandung: Angkasa.
- FGD & Laporan Internal SMPN 3 Karang Bahagia. (2025). *Dokumentasi Implementasi PMM di SMPN 3 Karang Bahagia* (Laporan tidak dipublikasikan).
- Furhatul, F. (2023). Pengaruh Penggunaan Platform Mengajar terhadap Keaktifan Belajar PAI Ditinjau dari Kepercayaan Diri Siswa (*Tesis*). UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Geertz, C. (1983). *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York, NY: Teachers College Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoadley, U., & Wibowo, A. (2021). *Digital literacy and teacher practice in Indonesia (laporan)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kustiningsih, N., & Farhan, A. (2018). *Manajemen Keuangan: Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan*. Sidoarjo: CV Globaleara.
- Loe, R., & Manning, A. (2015). *Leadership and School Improvement*. London: Routledge.

- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (ed. revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, S. (2015). *Manajemen Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Murdiyanto, D. E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LP2M.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- OECD. (2019). *Trends Shaping Education 2019*. Paris: OECD Publishing.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Manajemen Strategis (ed. Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2009). *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Oxford: Blackwell.
- Ridhotullah, S., & Jauhar, M. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates (2nd ed.)*. London: Bloomsbury.
- Siagian, S. P. (2015). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stoner, J. A. F., & Gilbert, J. R. (2005). *Manajemen (Jilid I)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syatrian, H. (2022). Studi tentang Dampak Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Sistem Pengukuran Kinerja Guru terhadap Kesempatan Pengembangan Diri Guru pada SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari (Skripsi). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- UNESCO. (2011). *ICT Competency Framework for Teachers*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2020). *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. Paris: UNESCO.
- Wibowo, A. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Bank. (2021). *Remote Learning, EdTech & COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Jurnal

- Erialdy, E., Mulyanto, A. I., Prastowo, S. L., & Permana, A. I. (2021). Penilaian Prestasi Kerja Menggunakan Aplikasi Online Pada Pegawai Negeri Sipil. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(1), 136-142.
- Hidayat, D. (2017). Analisis solidaritas dan survivalitas Madura di pasar tradisional. *Jurnal @Trisula LP2M Undar*, 1(5), 508-516.
- Kusmaniar, L., Kasmini, L., & Sariakin. (2024). Pengaruh Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP Rayon 2 Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan*, 5(2).

- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. *School Effectiveness and School Improvement*, 17(2), 201–227.
- Lestari, S., & Putri, N. (2024). Pemanfaatan PMM untuk pengembangan perangkat ajar pada guru SMP. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 45–60.
- Lisnawati, R. (2024). Hambatan implementasi PMM di sekolah pinggiran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 89–104.
- Liu, M., & Zhang, X. (2019). Evaluating e-learning platforms in teacher professional development: A systematic review. *Educational Technology Research and Development*, 67, 563–580.
- Lonka, K., & Hakkarainen, K. (2018). Teacher professional development in the digital era. *Computers & Education*, 125, 389–403.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). Economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 17(1), 76–85.
- Maslina, S., Zainuddin, Y., Mudjisusaty, Y., & Pangaribuan, W. (2024). Analisis kebijakan pendidikan program Merdeka Belajar: Studi kasus implementasi PMM dalam pengelolaan kinerja guru. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 4(2), 601–611.
- Naylor, R., & McCormick, J. (2017). E-governance and public sector performance: lessons for Indonesia. *Public Administration Review*, 77(6), 927–936.
- Nurhasanah, D., Lyesmaya, D., & Nurasiah, I. (2024). Analisis strategi kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru pada Kurikulum Merdeka di SDN Cikaret. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2), 122–138.
- Nurjanah, R., dkk. (2022). Faktor demografi, literasi keuangan, sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(1).
- Priyatno, D. (2023). Analisis pemanfaatan PMM pada guru di kabupaten X: studi komparatif. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 7(1), 33–50.
- Rahmilia, T. R. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi PMM dalam meningkatkan kompetensi guru SMKN 1 Singingi Hilir. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 14(3), 245–256.
- Ro'fah, F., Gunansyah, G., & Puspita, A. M. I. (2024). Peran Platform Merdeka Mengajar dalam mendukung kesiapan guru untuk implementasi Kurikulum Merdeka: Tinjauan literature review. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah*, 9(2), 150–165.
- Rumbianingrum, W., dkk. (2018). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Almana)*, 2(3).
- Sari, T. P., & Hidayat, S. (2025). Evaluasi implementasi fitur pengelolaan kinerja PMM di sekolah menengah pertama: studi kasus kabupaten Bekasi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 3(1), 1–22.
- Sari, Y., & Putra, A. (2024). Model pendampingan guru dalam pemanfaatan PMM. *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 2(2), 77–95.

- Sato, R., & Wibowo, H. (2020). Teacher professional development and ICT integration in Southeast Asia. *Asia Pacific Journal of Education*, 40(1), 1–18.
- TPACK: Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Widodo, T., & Nugraha, A. (2023). Analisis hambatan literasi digital guru SMP di wilayah pinggiran. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(4), 210–226.
- Winataputra, A. (2024). Sinkronisasi PMM dan sistem penilaian kinerja daerah: tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 1(1), 11–33.
- Zainal, A. (2024). Dampak infrastruktur pada pemanfaatan PMM di sekolah menengah. *Jurnal Infrastruktur Pendidikan*, 2(1), 55–72.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2023). Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek. (2023). Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023: Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah melalui PMM. Jakarta: Ditjen GTK.
- Kemendikbudristek. (2023). Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Mendikbudristek Nomor 17 Tahun 2023 & Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja melalui PMM. Jakarta: Kemdikbudristek & BKN.
- Kemendikbudristek. (2024). Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0559/B.B1/GT.02.00/2024 tentang Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah melalui PMM (2 Februari 2024). Jakarta: Ditjen GTK.
- PermenPANRB / Peraturan terkait ASN (dokumen relevan). (2023). Peraturan tentang Penilaian Kinerja ASN. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.